

Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Menurut Sektor di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017

Elasticity of Employment Opportunities by District/City and by Sector in Aceh Province 2012-2017

Dodi Satriawan¹

Diterima: 1 Agustus 2021

Disetujui: 3 Agustus 2023

Abstrak: Provinsi Aceh merupakan bagian dari program pembangunan nasional, namun masalah serius yang menjadi perhatian oleh pemerintah adalah kesempatan kerja dan pengangguran dimana tingginya angka pengangguran dikarenakan keterbatasan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elastisitas kesempatan kerja di Provinsi Aceh selama periode 2012-2017. Perhitungan elastisitas kesempatan kerja diperoleh dari perbandingan persentase pertumbuhan tenaga kerja dengan persentase pertumbuhan ekonomi (PDRB). Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Aceh dari tahun 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2012-2017 elastisitas kesempatan kerja di Provinsi Aceh lebih banyak masuk kategori elastis, kecuali pada tahun 2012 dan 2017 tergolong kategori inelastis. Walaupun dominan masuk kategori elastis, namun selama periode tersebut pertumbuhan kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh cenderung belum stabil. Faktor pertumbuhan ekonomi masih belum konsisten untuk menjadi salah satu pemicu peningkatan kesempatan kerja secara lebih stabil di banyak kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Jika dilihat berdasarkan sektor, jumlah kesempatan kerja yang ideal banyak terdapat di sektor primer (lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan; dan lapangan usaha pertambangan dan penggalan).

Kata kunci: Elastis; Inelastis, Lapangan Usaha, Kuantitatif

Abstract: The Province of Aceh is part of the national development program, but a serious problem that the government pays attention to is job opportunities and unemployment where the high unemployment rate is due to limited employment opportunities. This study aims to analyze the elasticity of employment opportunities in Aceh Province during the period 2012-2017. The calculation of the elasticity of employment opportunities is obtained from the comparison of the percentage of labor growth with the percentage of economic growth (GDP). This study uses quantitative analysis techniques. The data used is secondary data, namely labor growth and economic growth (GRDP) of Aceh Province from 2012-2017. The results showed that during the period 2012-2017 the elasticity of employment opportunities in Aceh Province was mostly in the elastic category, except in 2012 and 2017 it was classified as inelastic. Although dominant in the elastic category, during this period the growth of employment opportunities in districts/cities in Aceh Province tended to be unstable. The economic growth factor is still inconsistent to be one of the triggers for a more stable increase in job opportunities in many districts/cities in Aceh Province. When viewed by sector, the ideal number of job opportunities is mostly found in the primary sector (agriculture, plantation, forestry, hunting and fishery business fields; and mining and quarrying business fields).

Keywords: Elastic; Inelastic, Business Field, Quantitative

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Korespondensi: dodisatriawan@bps.go.id

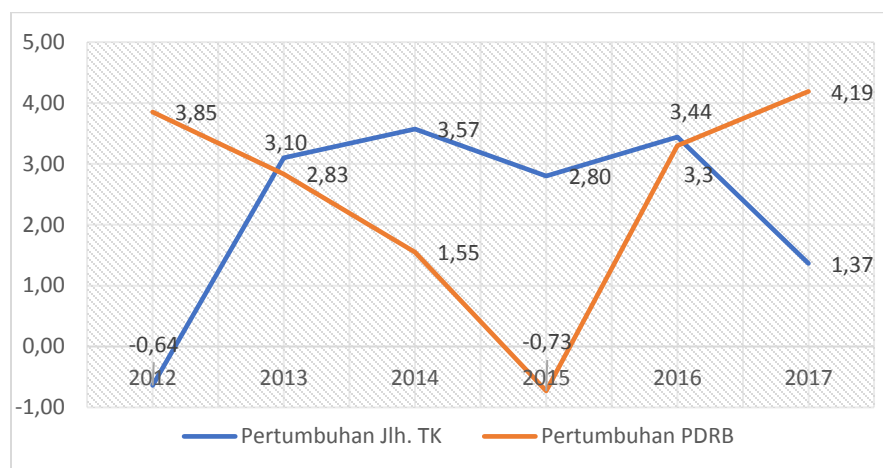
PENDAHULUAN

Perkembangan manusia pada beribu-ribu tahun lalu sangat lambat namun kemudian bergerak sangat cepat. Jika dilihat dari sisi demografis menunjukkan bahwa perkembangan penduduk yang cepat disebabkan karena angka kelahiran yang tinggi sedangkan dilain sisi angka kematian yang menurun akibat kemajuan teknologi di bidang kedokteran, perbaikan lingkungan hidup dan peningkatan keadaan sosial ekonomi. Namun tidak dapat dikesampingkan juga kondisi wabah seperti Covid-19 yang berdampak pada berbagai bidang dan sektor. Pembangunan sejatinya merupakan rangkaian upaya membangun, menyempurnakan, meningkatkan serta mengembangkan secara berkesinambungan pembangunan nasional dan daerah secara terarah dan bertahap terutama setelah peralihan masa pandemi ke dalam tatanan kehidupan normal baru. Dalam RPJMN 2020-2024 tantangan yang dihadapi Indonesia ini adalah bagaimana menciptakan suatu sistem pembangunan yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini faktor penduduk menjadi penting karena merupakan modal utama dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia (Djunaedi, 2009).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau usaha penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk, karena dengan kesempatan kerja penduduk akan memperoleh pendapatan guna pemenuhan kebutuhan hidupnya (Todaro, 2003). Ada beberapa indikasi terjadinya proses pembangunan ekonomi diantaranya adalah perubahan dalam struktur penduduk dan ketenagakerjaan serta penurunan tingkat pengangguran. Hampir di setiap negara perbaikan struktur ekonomi akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sektor-sektor yang berkaitan. Peningkatan kualitas sektor-sektor tersebut akan kembali berdampak pada penciptaan lapangan kerja dimana akan terjadi penyerapan angkatan kerja sebesar-besarnya ke dalam dunia kerja. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang umum serta mendasar yang dimiliki oleh hampir semua negara berkembang. Masalah tersebut diantaranya terkait dengan kesempatan kerja, tingkat upah serta produktivitas yang rendah terutama dalam masa pandemi dan tatanan kehidupan normal baru seperti sekarang ini (Lestari, 2013). Todaro (2003) menjelaskan terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja. Jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dan secara teori hal tersebut menunjukkan adanya ekspansi dalam kegiatan produksi yang kemudian akan meningkatkan kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi.

Provinsi Aceh merupakan wilayah di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara. Pembangunan yang terjadi di provinsi Aceh merupakan bagian dari program pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Aceh secara khusus. Dalam proses pembangunan tersebut tentu saja akan melibatkan penduduk yang mempunyai peran utama sebagai penggerak pembangunan yang pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang mapan dan kebutuhan hidupnya akan terpenuhi (Hirschman, 2004).

Gambar 1 merupakan grafik pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja di provinsi Aceh. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Provinsi Aceh tidak berjalan dalam tren yang sama. Dalam kurun tahun 2012-2017 pertumbuhan ekonomi (PDRB) maupun pertumbuhan jumlah tenaga kerja pergerakannya berfluktuasi dan saling berlawanan bahkan ada yang mencapai nilai persentase negatif. Kondisi tersebut berarti jumlah penduduk yang bekerja terus berkurang ketika pertumbuhan ekonomi justru sedang meningkat serta sebaliknya. Mulai tahun 2012-2015 pertumbuhan ekonomi terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya hingga menyentuh angka -0,73 persen pada tahun 2015. Penurunan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja juga sempat menyentuh angka negatif pada tahun 2012 sebesar -0,64 persen, kemudian pada tahun 2015 dan 2017 juga mengalami penurunan (Chodijah, 2010).



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka 2012-2017

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Aceh Tahun 2012-2017

Masalah serius yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah adalah penyerapan tenaga kerja dan pengangguran dimana tingginya angka pengangguran dikarenakan keterbatasan lapangan kerja. Masalah ini tentunya akan memberikan tekanan terhadap perekonomian serta berdampak buruk terhadap sosial misalnya akan meningkatkan kasus kriminal dan sebagainya. Jadi, salah satu solusi bagi pemerintah Aceh adalah menciptakan lapangan kerja baru agar mengurangi pengangguran di Provinsi Aceh (Akhbar, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan menganalisis tingkat elastisitas kesempatan kerja di provinsi Aceh pada level provinsi dan kabupaten/kota serta melihat sektor mana yang memberikan kesempatan kerja paling besar pada tahun 2012-2017, dimana nantinya dapat memberikan gambaran fokus pembangunan untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik dalam masa dan setelah pandemi ini berakhir nantinya. Sehingga berdasarkan tujuan penelitian diatas maka peneliti mengambil judul “Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Menurut Sektor di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 Sebagai Gambaran Fokus Pembangunan Pasca Pandemi Covid-19”.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan cara eksplanasi komparatif dimana akan dijelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta perbedaannya dengan kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dihitung besaran koefisien elastisitas kesempatan kerja dalam level provinsi dan kabupaten kota. Wilayah yang diteliti yaitu Provinsi Aceh yang memiliki 18 kabupaten dan 5 kota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data *time series* 5 tahun di semua kabupaten/kota sehingga total titik pengamatan data sebanyak 115. Setelah didapatkan nilai elastisitas tiap kabupaten kota kemudian akan digambarkan secara spasial untuk mengetahui perbedaan jenis elastisitas tiap wilayah berdasarkan tahun. Adapun konsep dalam menghitung elastisitas kesempatan kerja menurut Widodo (1990) adalah sebagai berikut.

$$\text{Elastisitas Kesempatan Kerja} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja}}{\% \text{ Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)}}$$

Berdasarkan konsep elastisitas, kategori elastisitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Inelastis sempurna terjadi jika nilai koefisien elastisitasnya adalah 0 (nol). Hal ini berarti kenaikan atau penurunan PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah pertumbuhan tenaga kerja.
- b) Elastis sempurna terjadi jika nilai koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga (∞). Hal ini berarti pertumbuhan jumlah tenaga kerja akan tetap terjadi walaupun tidak terjadi pertumbuhan PDRB.
- c) Elastisitas uniter terjadi jika nilai koefisien elastisitasnya sebesar 1 (satu). Hal ini berarti persentase pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja.
- d) Tidak elastis (*inelastis*) terjadi jika nilai koefisien elastisitasnya kurang dari 1 (satu). Hal ini berarti persentase perubahan PDRB lebih besar dari pada persentase perubahan jumlah tenaga kerja.
- e) Elastis terjadi jika Nilai koefisien elastisitasnya lebih dari 1 (satu). Hal ini berarti persentase perubahan PDRB lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2012 – 2017 hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data hasil sakernas dipublikasikan secara kontinu, namun pada tahun 2016 sakernas batal diselenggarakan sehingga data tenaga kerja Provinsi Aceh berdasarkan kabupaten/kota pada tahun tersebut tidak dapat diperoleh. Hal ini mengakibatkan analisis yang dilakukan hanya sebanyak 5 tahun yaitu 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Selain data sakernas juga digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Data publikasi hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang digunakan yaitu publikasi bulan Agustus karena hasil survei pada bulan tersebut ditujukan untuk estimasi kabupaten/kota sehingga sampel lebih banyak dan lebih mewakili populasi. Sebagai data pelengkap juga digunakan data dari publikasi Provinsi Aceh Dalam Angka 2018, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angkatan Kerja di Provinsi Aceh

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Statistik Indonesia, 2017). TPAK Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Aceh. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Anton, 2017).

Tabel 1. Jumlah Angkatan Kerja Yang Berusia 15 Tahun Keatas yang Pernah Bekerja dan Belum Bekerja

Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah	TPAK
	Bekerja	Belum Bekerja		
2012	1808357	180126	1988483	63,78
2013	1842671	207405	2050076	61,77
2014	1931823	191489	2123312	63,06
2015	1966018	216806	2182824	63,44
2016*				
2017	2138512	150265	2288777	63,74

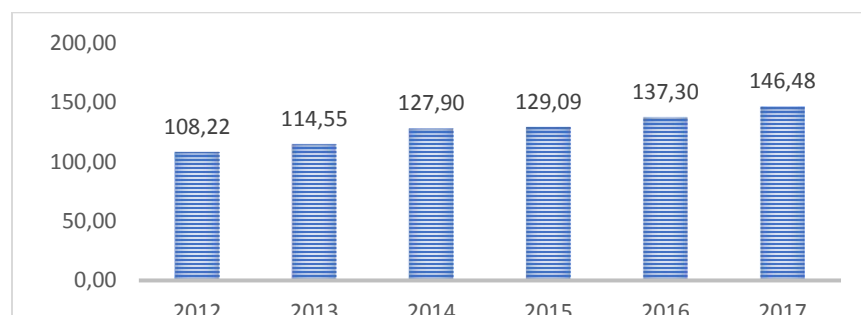
Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2012 – 2017

Keterangan: *) Data tidak tersedia karena tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas Agustus

Dari Tabel 2 TPAK pada tahun 2012 sebesar 63,78% yang artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Aceh, sebanyak 63-64 orang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa sampai tahun 2013. Begitu juga untuk tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013 terdapat sebanyak 61-62 orang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa sampai tahun 2014. Selain itu dapat juga dilihat bahwa partisipasi angkatan kerja pada umumnya akan meningkat seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2013 dimana terjadi peningkatan angkatan kerja namun terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pemicu terjadinya kondisi ini akibat jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat yang mengakibatkan TPAK menurun (Yuliana, 2012).

PDRB Provinsi Aceh

PDRB provinsi Aceh dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan secara riil perekonomian Provinsi Aceh. Jika dilihat dari Gambar 2 diketahui bahwa pada tahun 2012 PDRB Provinsi Aceh sebesar 108,22 triliun Rupiah. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 114,55 triliun Rupiah. Sedangkan pada tahun 2014 sampai tahun 2017 besarnya PDRB Provinsi Aceh berturut-turut sebesar 127,90 triliun Rupiah, 129,09 triliun Rupiah, 137,30 triliun Rupiah, dan 146,48 triliun Rupiah.



Sumber: Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2012-2017

**Gambar 2. Grafik Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh 2012 – 2017
Elastisitas Kesempatan Kerja di provinsi Aceh 2012-2017**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (Widodo, 1990) elastisitas kesempatan kerja menggambarkan seberapa besar porsi perubahan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terjadi terhadap porsi perubahan pertumbuhan ekonomi. Besarnya elastisitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesempatan kerja di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Elastisitas Kesempatan Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (%)	Pertumbuhan Jlh. TK (%)	Elastisitas	Kategori
2012	3,85	-0,64	-0,17	Inelastis
2013	2,83	3,10	1,09	Elastis
2014	1,55	3,57	2,30	Elastis
2015	-0,73	2,80	-3,84	Elastis
2016*				
2017	4,19	1,37	0,33	Inelastis

Sumber: Data olahan, 2018

Keterangan: *) Data tidak tersedia karena tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas Agustus

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa dari tahun 2012-2017 elastisitas kesempatan kerja di Provinsi Aceh lebih banyak masuk kategori elastis, hanya pada tahun 2012 dan 2017 kategorinya inelastis. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi cukup mendorong respon pertumbuhan jumlah tenaga kerja.

Pada tahun 2012 nilai elastisitas kesempatan kerja di Provinsi Aceh bernilai negatif yaitu sebesar -0,17 yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terbalik terhadap pertumbuhan kesempatan kerja. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,85 persen akan tetapi pertumbuhan kesempatan kerja justru tumbuh negatif sebesar -0,64 persen. Nilai elastisitasnya sebesar -0,17 dan termasuk kategori inelastis. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi justru mendorong penurunan kesempatan kerja. Pada tahun tersebut, tampaknya pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak mampu meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Aceh (Asmaria, 2013).

Pada tahun 2013 di Provinsi Aceh terjadi lonjakan drastis pada pertumbuhan kesempatan kerja dari -0,64 persen ditahun sebelumnya menjadi 3,10 persen diantara pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebesar 2,83 persen. Nilai elastisitas mencapai angka 1,09 dan termasuk kedalam kategori elastis yang artinya persentase pertumbuhan ekonomi lebih kecil daripada persentase pertumbuhan tenaga kerja Provinsi Aceh. Hal ini dapat diartikan jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 1,09 persen. Besarnya serapan tenaga kerja pada tahun 2013 sebesar 1.842.671 orang atau bertambah 34.314 orang tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya (Isbah dkk, 2016).

Kondisi pada tahun 2014 di Provinsi Aceh tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun sebelumnya dimana terjadi lonjakan pada pertumbuhan kesempatan kerja dari 3,10 persen ditahun sebelumnya menjadi 3,57 persen, serta pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi sebesar 1,55 persen. Nilai elastisitas mencapai angka 2,30 dan termasuk kedalam kategori elastis yang artinya persentase pertumbuhan ekonomi lebih kecil daripada persentase pertumbuhan tenaga kerja Provinsi Aceh. Hal ini berarti jika pada tahun 2014 jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 1 persen maka jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 2,30 persen. Besarnya serapan tenaga kerja pada tahun 2014 sebesar 1.931.823 orang atau bertambah 89.152 orang tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap kinerja

pemerintahan yang baru terpilih pada pemilu 2014 sehingga sektor usaha merespon positif dengan pembukaan lapangan kerja baru.

Pada tahun 2015 di Provinsi Aceh terjadi penurunan pertumbuhan kesempatan kerja dari 3,57 persen ditahun sebelumnya menjadi 2,80 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi bernilai negatif yaitu sebesar -0,73 persen. Nilai elastisitas mencapai angka -3,84 dan termasuk kedalam kategori elastis yang artinya persentase pertumbuhan ekonomi lebih kecil daripada persentase pertumbuhan tenaga kerja Provinsi Aceh. Pada tahun ini terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sampai angka negatif namun kondisi ini masih mampu membuat kondisi penyerapan tenaga diangka positif walaupun menurun dibanding tahun 2014 yang artinya telah terjadi peningkatan pengangguran yang bisa saja terjadi karena ekspektasi pasar kerja terhadap pemerintah tidak sesuai dengan harapan.

Pada tahun 2017 nilai elastisitas kesempatan kerja di Provinsi Aceh bernilai positif yaitu sebesar 0,33 yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan searah terhadap pertumbuhan kesempatan kerja. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19 persen serta pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,37 persen. Nilai elastisitasnya sebesar 0,33 namun termasuk kategori inelastis. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi justru mendorong penurunan kesempatan kerja. Pada tahun tersebut, tampaknya pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak mampu meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Aceh.

Perbandingan Elastisitas Kesempatan Kerja Antar Kabupaten Kota di Aceh

Pada bagian ini akan dibahas hasil penghitungan nilai elastisitas dan perbandingan elastisitas kesempatan kerja yang dicapai oleh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa hanya terdapat 2 nilai elastisitas dari 5 nilai elastis yang mungkin terjadi di suatu wilayah yaitu nilai elastis dan inelastis. Kondisi ini menggambarkan bagaimana hubungan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh (Lestari, 2013).

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa elastisitas kesempatan kerja pada masing-masing kabupaten/kota di Aceh mengalami fluktuasi selama periode 2012-2017. Dari 2 kondisi nilai elastisitas yaitu elastis dan inelastis dapat dikelompokkan menjadi 4 kondisi yaitu elastis dengan angka positif, inelastis dengan angka positif, elastis dengan angka negatif, inelastis dengan angka negatif (Widodo, 1990).

Dari 23 kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2012 terdapat 4 wilayah yang mempunyai nilai elastis dengan angka positif, tahun 2013 sebanyak 8 wilayah, tahun 2014 sebanyak 18 wilayah, tahun 2015 sebanyak 10 wilayah, dan tahun 2017 sebanyak 14 wilayah. Nilai elastisitas yang berkategori elastis dengan angka positif menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan kesempatan kerja di kabupaten/kota pada tahun tersebut. Kondisi demikian dapat terjadi karena persentase pertumbuhan kesempatan kerja lebih besar dari persentase pertumbuhan ekonominya. Kondisi ini adalah yang paling ideal dalam suatu perekonomian karena dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah mampu meningkatkan aktivitas dalam sektor usaha sehingga kesempatan kerja meningkat.

Tabel 3. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2012 - 2017

Kabupaten/Kota	Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)										
	2012		2013		2014		2015		2016*	2017	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori		Nilai	Kategori
Kab. Simeulue	-1,49	Inelastis	-0,45	Inelastis	-0,82	Inelastis	1,59	Elastis		4,58	Elastis
Kab. Aceh Singkil	-0,71	Inelastis	-1,11	Inelastis	5,28	Elastis	-0,24	Inelastis		-0,59	Inelastis
Kab. Aceh Selatan	-0,44	Inelastis	0,12	Inelastis	1,07	Elastis	-1,56	Inelastis		2,25	Elastis
Kab. Aceh Tenggara	0,56	Inelastis	-2,61	Inelastis	8,07	Elastis	0,37	Inelastis		2,80	Elastis
Kab. Aceh Timur	0,60	Inelastis	0,41	Inelastis	-16,12	Elastis	1,40	Inelastis		1,24	Elastis
Kab. Aceh Tengah	2,89	Elastis	1,51	Elastis	0,29	Inelastis	1,40	Elastis		1,73	Elastis
Kab. Aceh Barat	-14,98	Inelastis	1,30	Elastis	2,22	Elastis	1,08	Elastis		-0,02	Inelastis
Kab. Aceh Besar	-2,64	Inelastis	-0,17	Inelastis	1,96	Elastis	2,91	Elastis		-0,41	Inelastis
Kab. Pidie	1,32	Elastis	0,10	Inelastis	-0,20	Inelastis	0,42	Inelastis		1,10	Elastis
Kab. Bireun	-1,14	Inelastis	1,44	Elastis	2,74	Elastis	-0,47	Inelastis		6,65	Elastis
Kab. Aceh Utara	-6,26	Inelastis	-0,93	Elastis	0,86	Elastis	0,21	Elastis		5,36	Elastis
Kab. Aceh Barat Daya	-9,40	Inelastis	5,04	Elastis	1,43	Elastis	2,69	Elastis		3,09	Elastis
Kab. Gayo Lues	3,78	Elastis	1,51	Elastis	1,69	Elastis	0,68	Inelastis		-0,24	Inelastis
Kab. Aceh Tamiang	0,10	Inelastis	-1,81	Inelastis	3,56	Elastis	-0,15	Inelastis		3,25	Elastis
Kab. Nagan Raya	-2,24	Inelastis	0,75	Inelastis	4,06	Elastis	-1,19	Inelastis		2,55	Elastis
Kab. Aceh Jaya	-1,22	Inelastis	-1,11	Inelastis	3,60	Elastis	4,03	Elastis		-0,71	Inelastis
Kab. Bener Meriah	3,29	Elastis	1,73	Elastis	1,28	Elastis	2,42	Elastis		-0,77	Inelastis
Kab. Pidie Jaya	0,31	Inelastis	-1,48	Inelastis	3,14	Elastis	0,59	Inelastis		0,64	Inelastis
Kota Banda Aceh	-0,93	Inelastis	1,14	Elastis	1,12	Elastis	0,24	Inelastis		2,71	Elastis
Kota Sabang	-3,45	Inelastis	0,35	Inelastis	4,88	Elastis	2,71	Elastis		0,90	Inelastis
Kota Langsa	-1,21	Inelastis	-0,51	Inelastis	1,75	Elastis	3,07	Elastis		4,04	Elastis
Kota Lhokseumawe	-11,67	Inelastis	-9,94	Elastis	-0,40	Elastis	-0,03	Elastis		6,56	Elastis
Kota Subulussalam	-1,14	Inelastis	1,29	Elastis	1,87	Elastis	0,32	Inelastis		0,45	Inelastis

Sumber: Data olahan, 2018

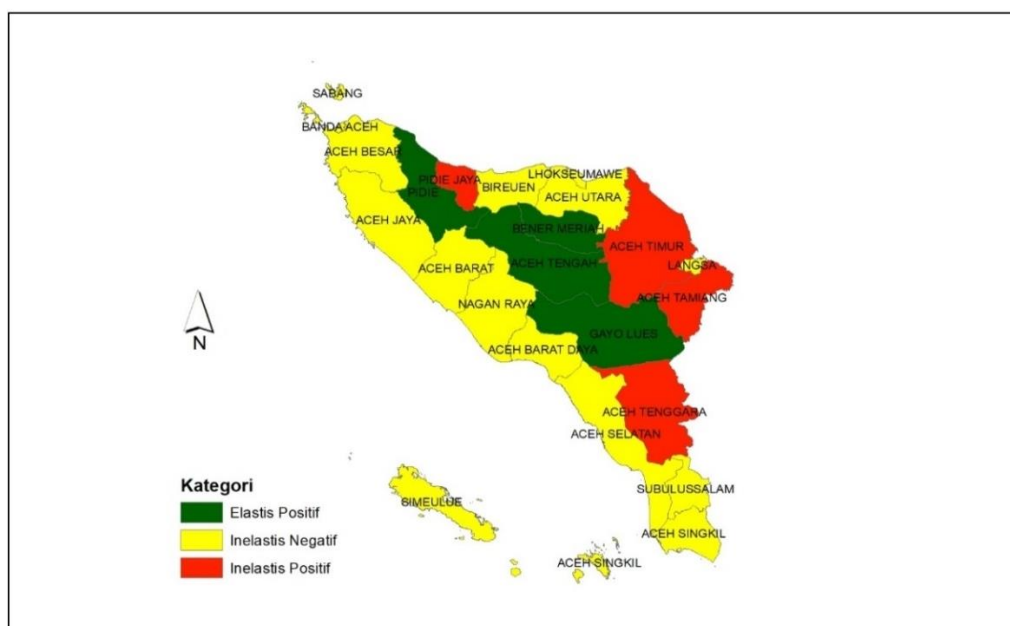
Keterangan: *) Data tidak tersedia karena tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas Agustus

Nilai elastisitas yang berkategori inelastis dengan angka positif pada tahun 2012 terdapat di 4 wilayah, 2013 di 5 wilayah, 2014 di 1 wilayah, 2015 di 7 wilayah, dan 2017 di 3 wilayah. Kondisi inelastis dengan angka positif menunjukkan bahwa masih tetap terjadi pertumbuhan kesempatan kerja di kabupaten/kota tersebut pada masing-masing tahun walaupun persentase pertumbuhan kesempatan kerja lebih kecil dari persentase pertumbuhan ekonominya. Kondisi ini kurang ideal dan kurang menguntungkan bagi perekonomian di suatu wilayah karena hal ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berperan efektif dalam meningkatkan aktivitas sektor-sektor usaha sehingga penggunaan tenaga kerja baru atau pembukaan lapangan kerja baru relatif lambat dan masih sedikit. Pada kondisi demikian biasanya angka pengangguran cenderung masih tinggi akibat masih sedikitnya lapangan kerja yang tersedia sementara pertumbuhan angkatan kerja terus meningkat (Putri, 2021).

Nilai elastisitas yang berkategori inelastis dengan angka negatif pada tahun 2012 terdapat di 15 wilayah, tahun 2013 di 8 wilayah, tahun 2014 di 2 wilayah, tahun 2015 di 5 wilayah, serta tahun 2017 di 6 wilayah. Kondisi inelastis dengan angka negatif menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan kesempatan kerja, yang terjadi justru pengurangan jumlah tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya. Persentase pengurangan tenaga kerja yang terjadi lebih kecil dari persentase pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Kondisi ini tidak baik bagi perekonomian suatu wilayah karena pengurangan tenaga kerja yang ada berarti peningkatan angka pengangguran. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang melambat mengakibatkan sektor-sektor usaha menjadi lesu yang

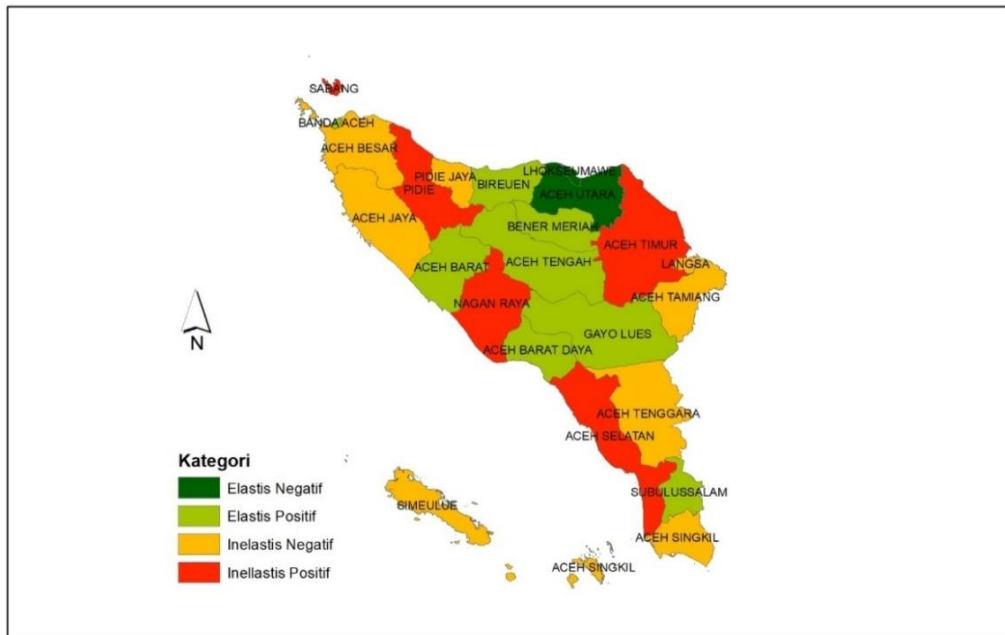
berdampak adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Nilai elastisitas berkategori elastis dengan angka negatif pada tahun 2013 terdapat di 2 wilayah, tahun 2014 di 2 wilayah, dan tahun 2015 di 1 wilayah, sedangkan pada tahun 2012 dan 2017 tidak terdapat wilayah yang mengalami elastis dengan angka negatif. Kondisi elastis dengan angka negatif menunjukkan bahwa tidak terjadi pertumbuhan kesempatan kerja, yang terjadi justru terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang relatif cukup besar dibanding periode sebelumnya. Persentase pengurangan kesempatan kerja yang terjadi lebih besar dibanding persentase pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut. Kondisi ini merupakan keadaan paradoks dan sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian di suatu wilayah. Kondisi paradoks adalah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut namun di saat yang sama tidak terjadi penambahan kesempatan kerja bahkan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja yang bekerja secara besar-besaran dalam perekonomian. Kondisi ini terjadi kemungkinan karena sektor usaha dalam perekonomian telah menggunakan teknologi canggih yang perannya mampu menggantikan peran tenaga manusia sehingga tenaga kerja manusia terus berkurang atau pada akhirnya tidak dipakai sama sekali. Kondisi lain yang bisa menyebabkan paradoks adalah terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus melambat dari periode sebelumnya sehingga mengakibatkan dunia usaha menjadi lesu. Kelesuan tersebut menyebabkan perusahaan akan berfikir rasional dalam mengambil keputusan sehingga perusahaan sangat mungkin akan menutup cabang-cabang usaha mereka akibat tekanan biaya produksi sehingga kemudian tenaga kerja mereka di PHK (Raditya dkk, 2015). Sebaran nilai elastisitas kesempatan kerja menurut kabupaten/kota selama 2012-2017 secara lebih detail digambarkan melalui peta tematik berikut.



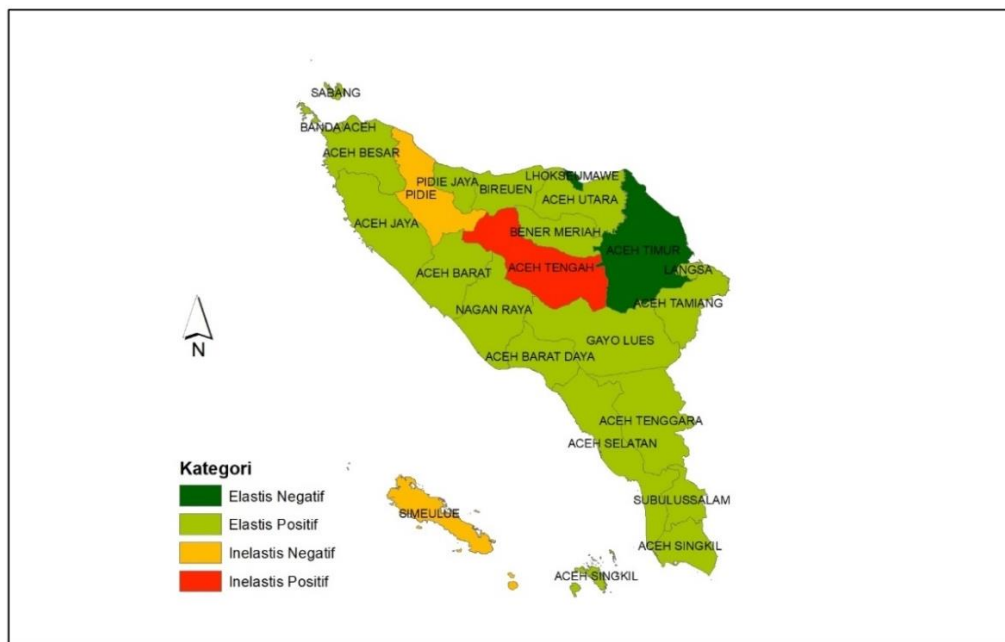
Sumber: Data Olah, 2018

Gambar 3. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2012



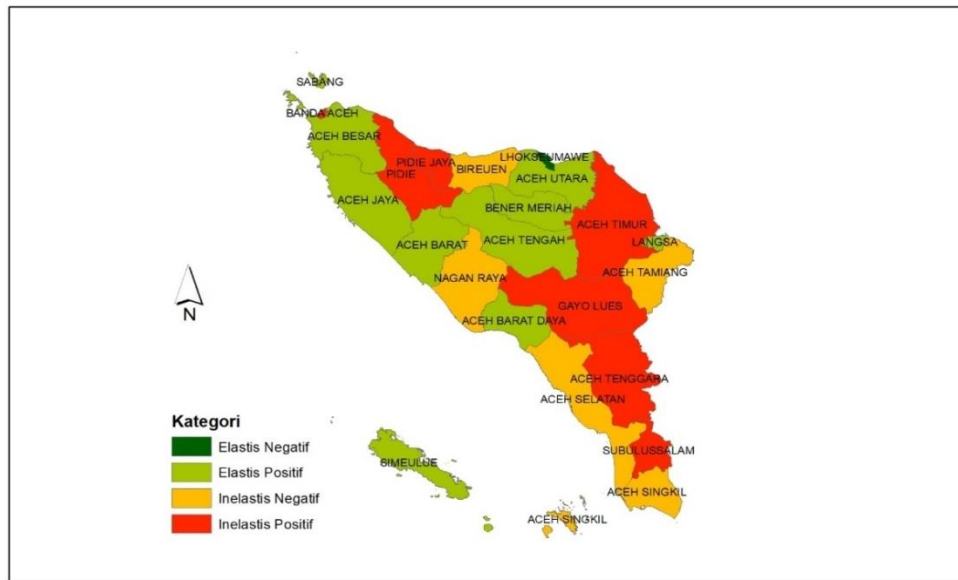
Sumber: Data Olahan, 2018

Gambar 4. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2013



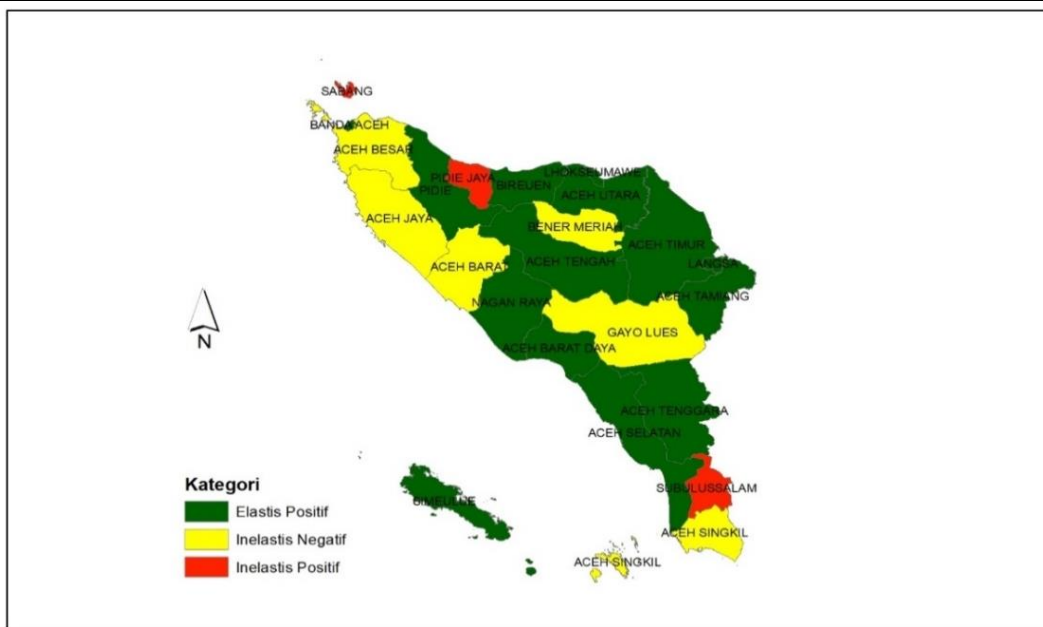
Sumber: Data Olahan, 2018

Gambar 5. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2014



Sumber: Data Olahan, 2018

Gambar 6. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015



Sumber: Data Olahan, 2018

Gambar 7. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2017

Kondisi Elastisitas Kesempatan Kerja berdasarkan Sektor di kabupaten/kota provinsi Aceh

Struktur perekonomian di kabupaten/kota provinsi Aceh secara umum dapat dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Trianto (2017) dalam penelitiannya membagi lapangan usaha pembentuk PDRB menjadi tiga sektor untuk mengetahui sektor mana saja

yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor primer (1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian), sektor sekunder (3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas, dan Air Minum; 5. Konstruksi), serta sektor tersier (6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi; 7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi; 8. Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan)

Perbandingan dilakukan melalui nilai rata-rata elastisitas di masing-masing sektor di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Nilai rata-rata yang didapat cenderung mengisyaratkan bahwa sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan diharapkan tenaga kerja baru dapat meningkatkan PDRB dimasing-masing sektor di Provinsi Aceh.

Tabel 4. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh di Sektor Primer Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)					
	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
Kab. Simeulue	-3,98	-0,71	-0,94	1,78		-5,37
Kab. Aceh Singkil	1,29	1,17	1,42	-3,65		16,82
Kab. Aceh Selatan	0,11	0,39	0,88	3,07		7,77
Kab. Aceh Tenggara	-0,82	2,70	2,52	12,24		0,24
Kab. Aceh Timur	6,45	-0,68	-0,34	0,02		-4,91
Kab. Aceh Tengah	2,16	0,63	0,58	6,43		-7,13
Kab. Aceh Barat	2,11	5,20	22,40	-1,55		-0,35
Kab. Aceh Besar	-1,04	-1,03	-1,32	16,52		4,10
Kab. Pidie	-0,31	-1,31	-1,64	0,23		-6,26
Kab. Bireun	-7,66	-1,26	-3,23	2,78		-16,32
Kab. Aceh Utara	-31,16	6,09	2,17	-0,31		1,01
Kab. Aceh Barat Daya	4,32	-0,32	-0,41	0,10		-5,99
Kab. Gayo Lues	6,89	2,67	1,86	-2,46		4,81
Kab. Aceh Tamiang	1,24	-3,47	-21,74	20,53		30,96
Kab. Nagan Raya	-2,65	-2,08	13,69	-12,62		-12,35
Kab. Aceh Jaya	0,21	6,63	-7,05	-20,15		6,36
Kab. Bener Meriah	2,81	6,64	0,21	3,89		20,49
Kab. Pidie Jaya	-1,05	-0,46	4,46	-2,92		3,81
Kota Banda Aceh	7,45	16,08	2,20	-16,95		-34,18
Kota Sabang	-2,52	0,25	0,17	18,63		8,13
Kota Langsa	-1,45	-2,32	-5,06	-12,92		-28,41
Kota Lhokseumawe	-5,96	2,99	4,77	-9,34		2,30
Kota Subulussalam	0,12	28,95	25,35	0,05		6,79

Sumber: Data olahan, 2018

Keterangan: *) Data tidak tersedia karena tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas Agustus

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa elastisitas kesempatan kerja menurut kabupaten/kota Provinsi Aceh di sektor primer tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi. Rata-rata elastisitas kesempatan kerja mencapai 0,70 ini berarti nilai elastisitas kesempatan kerja sektor primer yang positif sebesar 0,70 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 persen PDRB mampu menambah kesempatan kerja 0,70 persen.

Tabel 5. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh di Sektor Sekunder Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)					
	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
Kab. Simeulue	31,88	0,25	0,26	3,29		-2,01
Kab. Aceh Singkil	-2,39	3,96	3,01	-5,91		6,93
Kab. Aceh Selatan	1,60	2,77	-5,36	10,78		7,98
Kab. Aceh Tenggara	0,94	-0,69	-1,75	3,40		16,42
Kab. Aceh Timur	3,41	-0,38	-1,31	0,47		7,43
Kab. Aceh Tengah	4,42	-2,88	8,71	-7,81		3,60
Kab. Aceh Barat	5,38	1,75	0,28	1,65		6,97
Kab. Aceh Besar	-0,81	-0,25	3,28	-3,13		12,95
Kab. Pidie	-1,07	1,68	-2,85	5,07		7,14
Kab. Bireun	3,03	1,67	1,54	-0,69		6,72
Kab. Aceh Utara	4,27	7,03	3,14	7,17		-92,55
Kab. Aceh Barat Daya	-1,40	2,77	2,18	6,76		-0,36
Kab. Gayo Lues	-6,51	-2,85	-3,13	12,45		3,57
Kab. Aceh Tamiang	11,35	-0,57	-0,36	-2,47		8,63
Kab. Nagan Raya	6,86	0,86	0,55	1,09		-0,58
Kab. Aceh Jaya	5,49	-0,33	-0,30	-0,82		0,71
Kab. Bener Meriah	10,25	-1,09	-1,03	-8,40		34,67
Kab. Pidie Jaya	4,67	-3,87	-4,54	1,63		0,95
Kota Banda Aceh	-2,73	-1,26	-1,18	5,06		-5,88
Kota Sabang	10,18	-0,51	-0,53	10,75		-3,18
Kota Langsa	-3,86	5,91	6,83	-0,27		9,14
Kota Lhokseumawe	-1,28	-19,28	33,94	-1,88		-13,30
Kota Subulussalam	1,65	0,44	0,52	-2,94		23,82

Sumber: Data olahan, 2018

Keterangan: *) Data tidak tersedia karena tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas Agustus

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa elastisitas kesempatan kerja menurut kabupaten/kota Provinsi Aceh di sektor sekunder tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi. Rata-rata elastisitas kesempatan kerja mencapai 1,72 ini berarti nilai elastisitas kesempatan kerja sektor sekunder yang positif sebesar 1,72 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 persen PDRB mampu menambah kesempatan kerja 1,72 persen.

Tabel 6. Elastisitas Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh di Sektor Tersier Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)					
	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
Kab. Simeulue	-1,18	-0,56	-0,61	0,77		17,78
Kab. Aceh Singkil	-2,13	0,91	1,39	7,05		-6,83
Kab. Aceh Selatan	-1,55	1,33	1,37	-3,26		8,55
Kab. Aceh Tenggara	2,64	-0,26	-0,24	-5,11		5,35
Kab. Aceh Timur	-0,84	2,22	2,22	-4,39		4,94
Kab. Aceh Tengah	5,18	1,14	1,04	0,96		-3,16
Kab. Aceh Barat	-1,73	1,37	1,33	6,81		1,35
Kab. Aceh Besar	-4,18	1,29	1,18	-1,93		3,69
Kab. Pidie	6,29	2,77	2,87	-0,73		4,67
Kab. Bireun	3,60	3,66	5,62	-2,44		6,83
Kab. Aceh Utara	0,38	1,07	1,24	-4,03		2,53
Kab. Aceh Barat Daya	-0,50	5,20	-0,58	2,52		1,56
Kab. Gayo Lues	1,39	0,72	1,11	-4,03		3,57
Kab. Aceh Tamiang	-4,06	5,48	-3,70	11,20		0,14
Kab. Nagan Raya	-5,00	6,98	0,10	2,32		1,05
Kab. Aceh Jaya	-4,25	7,33	4,30	-4,49		6,54
Kab. Bener Meriah	2,63	1,41	-3,35	1,81		4,82
Kab. Pidie Jaya	-0,44	2,02	0,14	3,25		-0,79
Kota Banda Aceh	-0,80	0,80	0,86	0,48		0,62
Kota Sabang	-7,30	4,51	4,21	-0,55		2,94
Kota Langsa	-0,69	0,30	0,29	3,44		3,93
Kota Lhokseumawe	-3,22	0,87	0,81	-0,01		4,26
Kota Subulussalam	-2,31	3,27	2,41	1,08		1,74

Sumber: Data olahan, 2018

Ket: *) Data tidak tersedia karena tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas Agustus

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa elastisitas kesempatan kerja menurut kabupaten/kota Provinsi Aceh di sektor tersier tahun 2012-2017 masih cenderung berfluktuasi seperti dua sektor lainnya. Rata-rata elastisitas kesempatan kerja mencapai 1,27 ini berarti nilai elastisitas kesempatan kerja sektor sekunder yang positif sebesar 1,27 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 persen PDRB mampu menambah kesempatan kerja 1,27 persen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Marhaeni (2016) dinyatakan bahwa elastisitas kesempatan kerja yang ideal adalah $0 < E < 1$. Dari hasil nilai elastisitas ketiga sektor yang dihitung maka yang memenuhi syarat diatas adalah sektor primer (Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan; dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian). Sektor primer ini berarti yang paling dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan

kerja dibandingkan sektor sekunder dan sektor tersier di provinsi Aceh dari tahun 2012-2017 (Zain, 2016).

KESIMPULAN

Elastisitas kesempatan kerja di provinsi Aceh selama tahun 2012-2017 lebih banyak masuk dalam kategori elastis, kecuali pada tahun 2012 dan 2017 kategorinya inelastis. Hal ini berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode inelastis tersebut tidak terlalu mendorong respon pertumbuhan jumlah tenaga kerja karena persentase pertumbuhan kesempatan kerja lebih kecil dari persentase pertumbuhan ekonomi. Nilai elastisitas kesempatan kerja antar kabupaten/kota di Aceh setiap tahunnya cenderung berbeda. Namun selama tahun 2012-2017 pertumbuhan kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Aceh cenderung belum stabil. Faktor pertumbuhan ekonomi belum konsisten untuk menjadi salah satu pemicu peningkatan kesempatan kerja secara stabil di banyak kabupaten/kota di Aceh.

Jumlah kesempatan kerja yang ideal terdapat di sektor primer (lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan; dan lapangan usaha pertambangan dan penggalan). Sektor tersebut masih menjadi primadona di Provinsi Aceh dan diikuti oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer ini merupakan sektor yang paling dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja dibandingkan sektor sekunder dan sektor tersier

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait pembangunan harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakatnya dan memastikan produktivitas dari setiap sektor ekonomi menjadi titik optimal selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ideal. Banyak upaya yang dapat dilakukan diantaranya melaksanakan pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi tenaga ahli agar memiliki kesiapan untuk bekerja pada sektor keahliannya masing-masing dan meningkatkan konsumsi, serta mempermudah penyaluran kredit sebagai modal investasi usaha untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha mandiri dan mikro kecil.

Masyarakat sebagai individu yang membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya juga harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia kerja. Selain itu juga dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan keterampilan serta mempelajari teknologi yang ada demi peningkatan kualitas diri. Pihak pemerintah maupun swasta seharusnya melakukan investasi yang lebih besar pada sektor-sektor yang sedikit melakukan kesempatan kerjanya di setiap kabupaten/kota di Aceh yaitu pada sektor sekunder dan tersier.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, R.T., 2018. Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(1), pp.1-14.
- Asaddin, F., & Mansoer, F. W. 2001. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*. 1(1): 1-14.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2012. Jakarta: BPS.
- _____. 2012. Provinsi Aceh Dalam Angka 2012. Aceh: BPS.
- _____. 2013. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2013. Jakarta: BPS.
- _____. 2013. Provinsi Aceh Dalam Angka 2013. Aceh: BPS.
- _____. 2014. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2014. Jakarta: BPS.
- _____. 2014. Provinsi Aceh Dalam Angka 2014. Aceh: BPS.
- _____. 2015. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015. Jakarta: BPS.
- _____. 2015. Provinsi Aceh Dalam Angka 2015. Aceh: BPS.

- _____. 2015. Proyeksi Penduduk Kabupaten_Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi Aceh. Jakarta: BPS.
- _____. 2016. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2016. Jakarta: BPS.
- _____. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Tahun 2012-2016. Aceh: BPS.
- _____. 2016. Provinsi Aceh Dalam Angka 2016. Aceh: BPS.
- _____. 2017. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Jakarta: BPS.
- _____. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Tahun 2013-2017. Aceh: BPS.
- _____. 2017. Provinsi Aceh Dalam Angka 2017. Aceh: BPS.
- _____. 2017. Statistik Indonesia 2017. Jakarta: BPS.
- _____. 2018. Provinsi Aceh Dalam Angka 2018. Aceh: BPS.
- Chodijah, R., 2010. Elastisitas Kesempatan Kerja Berdasarkan Produktivitas Sektor Perekonomian Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), pp.40-48.
- Djunaedi, M.H., 2009. Analisis Proyeksi Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kabupaten Lombok Barat 2010-2025. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), pp.113-124.
- Hoppe, H. H. 1992. *Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian (Terjemahan)*. New York: Praeger.
- Hirschman, C. 2004. *Population And Development: What Do We Really Know?*. USA: University of Washington.
- Isbah, U. and Iyan, R.Y., 2016. Analisis peran sektor pertanian dalam perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19), pp.45-54.
- Latuconsina, A. 2013. Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja Sektor Sekunder di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 12(8): 21-35.
- Lestari, N. W. Y., & Marhaeni, A. A. I. N. 2013. Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5(12): 1513-1538.
- Mankiw, N. G. 2007. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Mantra, I. B. 2006. *Demografi Umum Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PPT-LIPI. 1999. *Pendidikan dan Pasar Kerja di NTT: STudi Penelusuran Terhadap Siswa SLTA Tahun 1996 di Pulau Timor*. Jakarta: LIPI.
- Putri, R.Z. and Effendi, M., 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), pp.356-366.
- Raditya, P.G. and Kurniawan, A., 2015. Perkembangan dan Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Ekonomi Daerah dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007-2011. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4).
- Sengka, C. A. 2015. *Analisis Tenaga Kerja Sektoral di Kota Tomohon*. Manado: Tidak Diterbitkan.
- Todaro, M. P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ke Delapan*. Jakarta: Erlangga.
- Trianto, A. 2017. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuisi*. 13(1): 1-14.
- Widodo, T. 1990. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuliana, Y., 2012. Potensi Sektor Ekonomi Dan Keterkaitannya Dengan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 6(3).
- Zain, M.M., 2016. Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja dan Kekakuan Upah Riil Sektoral di Sulawesi Selatan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 28(2), pp.113-132.